

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti untuk melakukan penelitian, dan juga dapat menjadi referensi dalam teori yang bisa digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung”, peneliti melihat beberapa pembahasan dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan implementasi kebijakan.

- a) Putri Irma Maulani Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Pasundan dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Indonesia dalam Perkembangan Foreign Direct Investment Jepang di Indonesia “ investasi asing di suatu negara khususnya investasi asing langsung diharapkan memberikan dampak positif bagi negeri. Oleh karena itu kebijakan pemerintah khususnya perihal peraturan penanaman modal asing menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan iklim investasi di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah indonesia dalam mengatur dan meningkatkan iklim investasi Indonesia, serta mengetahui kondisi *Foreign Direct Investment* di

Indonesia khususnya perkembangan investasi Jepang di Indonesia. Metode dalam penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif pada penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi asing langsung ke Indonesia. Metode penelitian bersifat deskriptif dalam menganalisis sebuah permasalahan yang berdasarkan pada informasi-informasi umum yang dilengkapi dengan data. Investasi khususnya investasi asing langsung dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terlebih Indonesia sebagai negara berkembang agar mampu bersaing untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sebesar 87 persen investasi Jepang di Indonesia direalisasikan dalam sektor industri manufaktur. Kontribusi subsektor industri manufaktur (otomotif) terhadap PDB sektor industri non migas mencapai 10,47 persen atau terbesar ketiga setelah subsektor industri makanan dan minuman.

- b) Debby Anggi Prasetyo Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo” dalam penelitian menjelaskan tentang akumulasi investasi yang masuk di daerah Sukoharjo dimana mencapai puluhan triliun dan investasi terbesar berada pada sektor industri, kemudian perdagangan dan jasa. Berdasarkan tingginya nilai investasi atau penanaman modal baik asing maupun dalam negeri yang cukup tinggi di Sukoharjo, maka hal ini merupakan sarana dalam menunjang perekonomian yang baik antara Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo ,Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris dengan mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo. Hasil pembahasan dan penelitian menyebutkan bahwa dalam melaksanakan PTSP,Bupati Sukoharjo memebrikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidanginya. Dengan adanya Perda Kabupaten Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal bahwa dalam penanaman modal di Sukoharjo tercatat realisasi investasai total PMDN selama 3 tahun terakhir mencapai Rp.7 triliun dan non fasilitas Rp.26 Triliun terehitung sejak 2016 hingga sekarang dengan jumlah investor sebanyak 5.174 investor dimana pada tahun 2016 Sukoharjo menduduki peringkat ke 2.

- c) Rosna Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Palu “ penelitian ini menjelaskan tentang pelayanan perizinan penanaman modal di kota palu yang belum berjalan maksimal yang disebabkan oleh 4 faktor utama yaitu komunikasi,sumber daya manusia,disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan efektif pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perizinan penanaman modal sebagai sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 5 informan yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data di kumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode interaktif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian				
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1	Putri Irma Maulani	Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Indonesia dalam Perkembangan Foreign Direct Investment Jepang di Indonesia	Implementasi kebijakan (George Edward III)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi wawancara
2	Debby Anggi Prasetyo	Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo	Teori implementasi kebijakan	Kualitatif	Deskriptif	Observasi wawancara
3	Zahrotun Nuraini	Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan	Teori Implementasi Kebijakan (Van Horn Van Meter)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi Wawancara

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Persamaan
1	Di penelitian yang dilakukan oleh Putri Irma Maulani menggunakan Teori Implementasi dari Edward George III sedangkan peneliti menggunakan teori Implementasi Varn Horn dan Varn Meter.	Peneliti dan Putri Irma Maulani sama-sama meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penanaman Modal walaupun fokus permasalahannya berbeda.
2	Di penelitian Debby Anggi Prasetyo menggunakan pendekatan empiris sedangkan peneliti menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.	Peneliti dan Debby Anggi Prasetyo sama-sama meneliti tentang peraturan pelaksanaan penanaman modal.
3	Di penelitian yang dilakukan oleh Rosna membahas tentang implementasi kebijakan namun implementasi kebijakan yang di teliti berbeda dengan apa yang di teliti oleh penulis.	Peneliti dan Rosna sama-sama menggunakan teori dari Varn Horn dan Varn Meter.

2.1.2 Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Secara *etimologis* administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare* yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Administrasi juga merupakan bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi terbagi menjadi dua pengertian dimana administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Hal ini sesuai dengan pengertian Administrasi yang dibedakan dalam 2 pengertian yang dikemukakan oleh **Silalahi (2013)** :

- 1) **“Administrasi dalam Arti sempit, yaitu penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam satu sama lain “**
- 2) **“Administrasi secara luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.**

Brooks Adams (1913) yang dikutip oleh **Wirman Syafri** dalam bukunya yang berjudul **Studi Tentang Administrasi Publik** menjelaskan administrasi sebagai berikut :

“Administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan”

Lalu **Sondang P Siahian (2008)** menjelaskan Administrasi adalah :

“Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Dari dua penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah ilmu yang memadukan masalah sosial yang dimana seluruh proses kerjanya melibatkan lebih dari 2 orang agar tujuan yang hendak dicapai bisa berjalan dengan baik.

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Instrumen tersebut adalah sejumlah unsur yang mutlak harus ada di dalam administrasi yang meliputi :

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Hubungan masyarakat

2. Pengertian Administrasi Publik

Istilah administrasi publik sendiri berasal dari bahasa Inggris dan memiliki dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya *intensif* dan *ministrare* adalah membantu atau melayani (to serve). Dengan demikian administrasi publik adalah membantu atau melayani dengan intensif. Sedangkan publik sendiri mengandung arti umum, negara dan masyarakat atau orang banyak. **Pfiffner & Presthus (1960:20)** mendefinisikan administrasi publik dapat didefinisikan sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik. Lalu **Dwight Waldo** mendefinisikan Administrasi publik sebagai organisasi manajemen manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Adapun pengertian menurut **Marshall Edward Dimocks & Gladys Ogden Dimock (1969:22)** yang dikutip oleh **Wirman Syafri** dalam bukunya yang berjudul **Studi Tentang Administrasi Publik :**

“Administrasi publik ialah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum karena di dalam dunia modern birokrasi merupakan pembuatan kebijakan pokok di dalam pemerintahan”

Sedangkan menurut **Nigro & Nigro** dalam **Stillman (1992:20)** administrasi publik ialah kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas

dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan individu dengan kelompok atau bisa disebut antara masyarakat dengan pemerintah secara terorganisir untuk mencapai tujuan konstitusional negara.

3. Fungsi Administarsi Publik

Selain beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian administrasi publik, administrasi publik juga mempunyai fungsi yang dikemukakan oleh **J.Wayong (dalam Bintoro 1995)** mengemukakan bahwa fungsi atau tugas utama administrasi publik pada dasarnya adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya.

Lalu **Gerald E caiden** menjelaskan beberapa fungsi administrasi publik sebagai berikut :

1. Fungsi tradisional, fungsi ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, hubungan luar negeri, pekerjaan umum, ketertiban dalam negeri, perpajakan serta pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi pembangunan bangsa, fungsi ini bertujuan untuk membangun rasa nasionalisme pada negara dan bangsa.
3. Fungsi manajemen ekonomi, fungsi ini adalah sebagai sebuah manajemen yang didalamnya terdiri dari manusia dan alat-alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan.
4. Fungsi kesejahteraan sosial, fungsi kontrol lingkungan yang sering terlohat dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kelestarian alam. Kegiatan lainnya adalah melakukan pengembangan, konservasi, tata kota dan lain-lain.

5. Fungsi hak asasi manusia, fungsi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan privasi, perlindungan serta pengendalian penduduk.

Selain fungsi administrasi publik juga mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan administrasi privat, **Caiden (1982)** menyatakan ada tujuh hal yang menjadi ciri administrasi publik yaitu :

1. Kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari
2. Administrasi publik mengharuskan kepatuhan
3. Administrasi publik mempunyai prioritas
4. Administrasi mempunyai kekecualian
5. Manajemen puncak administrasi publik adalah politik
6. Penampilan administrasi publik sulit diukur
7. Lebih banyak harapan yang di letakan pada administrasi publik

Selain itu administrasi publik juga memberikan batasan ciri-ciri seperti yang di kemukakan oleh **Thoha (2008)** sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan bersifat urgen (penting) jika dibandingkan dengan organisasi swasta.
2. Pelayanan yang diberikan pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu pada peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar.
5. Usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat.

Dari beberapa ciri administrasi diajukan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa ciri administrasi publik adalah selalu berhubungan dengan politik dimana dalam pelaksanaannya berupa suatu keharusan yang meliputi beberapa bidang diantaranya sosial, politik ekonomi, pertahanan. Administrasi juga mempunyai

skala prioritas dimana prioritasnya adalah kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan dimana dalam memberikan pelayanannya itu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Henry dalam Pasolong (2014) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri antara lain :

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Lalu **Lembaga administrasi Negara (2003)** menyebutkan bahwa sebagai salah satu disiplin dan sistem, ruang lingkup administrasi publik meliputi hal-hal berikut.

1. Tata usaha, menyangkut nilai kultural, spritiual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi publik.
2. Organisasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara lainnya.
3. Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan.

4. Sumber daya aparatur, sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaan.
5. Sistem dan kebijakan negara, meliputi beberapa unsur kebijakan perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, penilaian hasil.
6. Posisi dan peran masyarakat dalam bernegara, untuk mencapai tujuan bersama sehingga rakyatlah pemilik kedaulatan.
7. Hukum administrasi publik, menyangkut dimensi hukum yang bertalian dengan pengaturan dan sistem penyelenggaraan negara.

Dari beberapa unsur yang di kemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi publik terdapat berbagai macam bahasan yang meliputinya mulai dari organisasi, pengolahan pemerintahan, hubungan antar pemerintahan sampai pada etika perilaku para birokrat.

1.1.3 Konsep Kebijakan publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam ilmu administrasi publik terdapat ilmu yang harus di pelajari yaitu ilmu tentang kebijakan publik, istilah kebijakan atau kebijaksanaan berasal dari bahasa inggris yaitu *Policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena berkaitan dengan keputusan pemerintah. Kata *Policy* secara etimologis berasal dari kata *Polis* dalam bahasa yunani (Greek) yang berarti negara kota. Dalam bahasa latin kata ini berubah menjadi *politia* yang berarti negara dan dalam bahasa inggris berubah menjadi *Policie* yang artinya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan. Sedangkan

pengertian publik sendiri adalah pemerintah, masyarakat dan umum yang dimana kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang didalamnya memuat kepentingan untuk masyarakat umum.

Menurut **James Anderson (1984:3)** memberikan pendapat bahwa kebijakan publik adalah :

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan “

Lalu menurut **Carl Friedrich (1969:79)** yang dikutip oleh **Leo Agustino** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-dasar Kebijakan Publik** berpendapat bahwa kebijakan publik adalah :

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Agar pengertian kebijakan publik dapat dipahami lebih intens dan kompherensif **Singadilaga (2001:5)** memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*Set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
2. Pelaku kebijakan adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan

kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.

3. Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *Issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan dalam membuat keputusan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan dimana keputusan itu dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat untuk berjalannya pemerintahan yang lebih baik.

Selanjutnya **Nurcholis (2007:263)** memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal :

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit (unit organisasi pelaksanaan kebijakan)
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

2. Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga memiliki tingkatan seperti yang di tegaskan oleh **Nugroho (2006:31)** menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan presiden, dan Peraturan daerah
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati juga Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam penjelasan tingkatan kebijakan yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik dalam berupa Undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif karena masih memerlukan derivisi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjabar atau yang disebut juga dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan pelaksanaan.

Lalu terkait dengan tingkatan kebijakan secara umum **Abidin (2004:31-34)** membedakan kebijakan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dalam kebijakan publik juga dijelaskan adanya beberapa tahapan dalam proses terjadinya kebijakan yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi seperti yang di ungkapkan oleh **Gortner (1984:30-40)**

3. Proses Kebijakan Publik

Starling (1973:13) menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yaitu :

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisa data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisa sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran
4. Pelaksanaan program mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya

5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Dalam beberapa tahapan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat dipastikan bahwa pembuatan kebijakan publik terdapat tahapan mengidentifikasi masalah, memformulasikan kebijakan apa saja yang harus dilakukan, lalu mengadopsinya menjadi beberapa pilihan dan pelaksanaan program atau merancang pelaksanaannya agar kebijakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

4. Model Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga memiliki model-model kebijakan publik yang memiliki manfaat untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik seperti yang dikemukakan oleh **Thoha (2008:125)** sebagai berikut:

1. Model elite (*Policy* sebagai preferensi elite)

Model ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Walaupun sering dikemukakan oleh tokoh elite itu sendiri, bahwa *Policy Public* yang dianutnya adalah merefleksi dari tuntutan rakyat banyak. Model ini juga menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan *Publik policy* hendaknya dibuat apatis atau miskin informasi.

2. Model Kelompok (*Policy* sebagai keseimbangan kelompok)

Model kelompok ini pada saat tertentu dan kapanpun senantiasa merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok yang sedang berjuang. Model kelompok berusaha menerangkan semua aktivitas politik yang bermanfaat di dalam hubungannya dengan perjuangan kelompok.

3. Model kelembagaan (*Policy* sebagai hasil dari lembaga)

Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik tidaklah memberikan banyak perhatiannya pada hubungan antar struktur lembaga pemerintah dengan isi *Public policy*. Penelaahan kelembagaan biasanya hanya menjelaskan lembaga-lembaga pemerintahan secara spesifik misalnya menjelaskan tentang strukturnya, organisasi, tugas kewajiban, dan fungsinya.

4. Model proses (*Policy* sebagai suatu aktivitas politik)

Model ini adalah suatu rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan, penegasan, pelaksanaan dan evaluasi. Model proses ini juga menekankan bagaimana tahapan aktivitas yang dilakukan di dalam menghasilkan public policy.

5. Model Rasionalisme (*Policy* sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Model ini menilai dari suatu masyarakat secara keseluruhan dapat diketahui dan ditimbang. Hal ini berarti bahwa tidak cukup dengan menimbang nilai-nilai dari beberapa kelompok dan tidak mau mengetahui kelompok lain.

6. Model Inkrementalisme (*Policy* sebagai kelanjutan masa lalu)

Model ini menciptakan program *Policy* dan pembiayaan-pembiayaan dasar pemikirannya adalah bersifat konservatif. Dan perhatiannya terhadap program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program yang telah ada.

7. Model Sistem (*Policy* sebagai hasil dari suatu sistem)

Model ini menggambarkan *Public policy* sebagai hasil output dari suatu sistem politik. Pada konsep sistem terkandung di dalamnya serangkaian institusi dalam masyarakat dan aktivitasnya yang mudah diidentifikasi.

Demikian lah beberapa model yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memahami kebijakan publik sebagaimana dikatakan di depan model ini banyak dijumpai dalam literatur ilmu politik dan ilmu administrasi negara.

1.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu aktivitas di dalam proses kebijakan publik dimana isinya sering bertentangan dengan apa yang diharapkan dan bahkan menjadikan produk kebijakan sebagai batu sandungan bagi pembuatan kebijakan publik itu sendiri. **Tachjan (2006:63)** mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi birokrasi dalam proses kebijakan publik dapat di[ahami pula sebagai salah satu lapangan studi administarsi publik sebagai ilmu.

Lalu **Abdul Wahab (1997:53)** mengemukakan bahwa implementasi adalah :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang diatas, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”

Lalu **Van Horn (Wahab :1997)** mengartikan bahwa implementasi adalah:

”Implementasi adalah sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabar-pejabat atau kelompok-kelpompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam kebijakan.

Sedangkan **Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier** dalam bukunya *Implementation and Public Policy (1983:61)* mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang dilakukn setelah dirumuskannya sebuah kebijakan dan kegiatannya menyangkut adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya kegiatan pencapaian kegiatan dan adanya hasil yang telah dikerjakan.

Sehubungan dengan beberapa pengertian diatas **Anderson (1978:92)** menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Sesuai dengan apa yang dikatan oleh ahli yang diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang secara langsung melibatkan usaha untuk mencapai tujuan keputusan yang diinginkan.

Lebih lanjut lagi **Abidin (2004)** menjelaskan bahwa implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau

dari atas kebawah. Dan implementasi juga dapat dilihat dari empat pendekatan yaitu :

1. Pendekatan struktural.
2. Pendekatan prosedural.
3. Pendekatan kejiwaan.
4. Pendekatan politik.

Setelah dijelaskannya beberapa pendekatan yang di ungkapkan oleh para ahli diatas, ada juga beberapa masalah yang sering muncul sehingga implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan akibatnya adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Kesenjangan ini menurut **Warnham (dalam Salusu 2003:43:2)** di sebabkan oleh :

1. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan.
2. Kurangnya informasi.
3. Tujuan-tujuan dari unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikan.

Selain itu kesenjangan tersebut juga bisa jadi disebabkan oleh “(1) karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, (2) karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan” (**Abidin 2004:207**)

2. Model Implementasi Kebijakan

Apapun produk kebijakan yang dihasilkan, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa landasan atau model yang akan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini.

A. Model George C Edward III

George C. Edward III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik tersebut, dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan itu maka **Edward III (1980:10)** mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni : komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksanaan, struktur.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa birokrasi.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan(tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalau menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas(untuk ditetapkan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingunan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya. Menurut George C.Edwards III ada beberapa indikator dalam sumberdaya yaitu :

- a. Staff, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Kegagalan yang sering muncul dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staff yang

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.
- c. Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tidak adanya fasilitas pendukung (saran prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III adalah dsiposisi. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal penting yang perlu dicermati pada variabel ini adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksananya adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para [elaksana kebijakan.

4. Struktur Briokrasi

Variabel berikutnya menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk tidak dapat terlaksana atau terrealisasia karena terdapatnya kelemahan dalam struktur organisasinya. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat endongkrak kinerja struktur birokrasi adalah :

- a. Melakukan *Standar Operating Prosedurs (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi* . SOP adalah salah satu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai dalam beberapa unit kerja.

B. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut juga *A model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Dalam model ini terdapat enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi AntarOrganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal.

C. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan ini disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan di garap meliputi :
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis , termasuk diantaranya : kemampuan

untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik tertentu.

b. Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan) maka semakin besar peluang untuk kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakna maka semakin sukar /sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.

a. Kesecamatan dan kejelasan penjenjangan tujuan resmi yang akan di capai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya.

b. Keterandalanteori ausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alikasi sumberdana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan formal.

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

- g. Akses formal pihak-pihak luar

Faktor lainnya juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.

- 3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.

- b. Dukungan politik.

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga.

- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penunjukan institusi-institusi dan pejabat terasnya.

1.1.5 Pengertian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maksud dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pengendalian yaitu :

1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

2. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ruang lingkup yang dimaksud dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :

- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM disampaikan setiap triwulan dengan jumlah penanaman modal sebesar Rp.500.000.000 dan pelaporan persemester bagi perusahaan yang nilai penanaman modalnya dibawah angka Rp.500.000.000 . laporan LKPM wajib di laporkan oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ditembuskan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pelaku usaha wajib melaporkan LPKM nya secara online seperti yang sudah disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

1.2 Kerangka Berpikir

Berkaitan dengan usulan penelitian ini dan untuk mempermudah dalam memahami masalah dalam penelitian ini diperlukannya dasar pemikiran dan landasan yang berdasarkan fakta, observasi, dan kepustakaan. Dalam kerangka berpikir ini memuat teori yang dipilih, konsep dari para ahli.

Realisasi investasi dinilai sangatlah penting karena realisasi investasi memberikan perkembangan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi pusat maupun daerah, nilai realisasi investasi di dapat dari jumlah pelaporan LKPM pelaku usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, target realisasi investasi kota Bandung sendiri sudah melebihi target dari apa yang sudah ditetapkan, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan LKPM nya sebagai mana yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 7 Tahun 2018 dimana hak dan kewajiban pelaku usaha adalah melaporkan LKPM kepada dinas terkait melalui online, dari data yang di dapat hanya 1468 perusahaan yang melaporkan LKPM dan sedangkan pada tahun 2020 ada sebanyak 40,561 perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan LKPM.

Dalam melakukan penyelenggaraan pengendalian penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung kesulitan karena banyaknya perusahaan yang harus dipantau dan melakukan pelanggaran sedangkan jumlah sumber daya yang dimiliki dinas sangat minim dan membuat kegiatan penyelenggaraan pengendalian tidak berjalan efektif.

Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal No 7 tahun 2018 dimana kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas terkait sesuai dengan wilayah dan kewenangannya. Dan penyampaian kewajiban LKPM diatur dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 lalu di uraikan tata cara pedoman nya dalam Peraturan BKPM No 7 tahun 2018 dalam pasal 10 bahwa LKPM wajib disampaikan secara online melalui SPIPSE.

Dari fenomena dan permasalahan diatas peneliti menganggap bahwa dalam pengimplementasiannya sendiri belum berjalan efektif dan terdapat banyak kendala. Dan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berjalan maka perlu dilakukannya penelitian secara mendalam dan peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang dimana memiliki enam dimensi diantaranya :

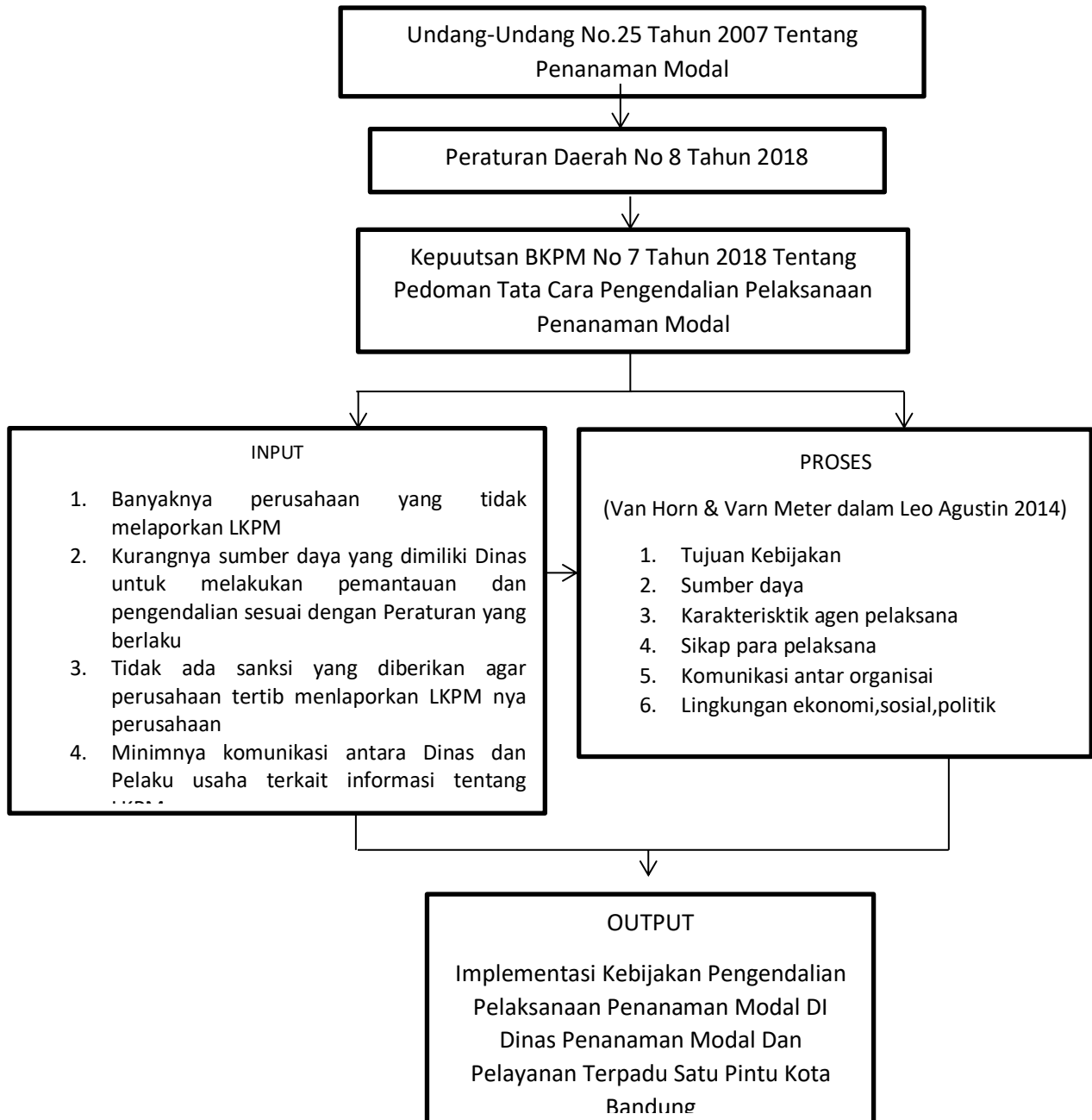
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan agen pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi
6. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

karena peneliti menganggap model ini paling cocok dan relevan dengan indikasi penelitian yang ditemukan peneliti. Sehingga dari fenomena diatas dapat dinilai bahwa model ini akan memudahkan dalam mengetahui sebaik apa dan bagaimana implementasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota bandung.

Agar lebih mudah di pahami peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir ke dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



1.3 Proposisi

Proposisi merupakan dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kajian pustaka serta kerangka berpikir yang ada, maka proposisi penelitian implementasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bandung ditentukan oleh Tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Maka proposisi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung masih belum optimal/
2. Adanya berbagai kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dalam penerapan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.